

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Pada era globalisasi ini perkembangan organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi dan apabila anggota atau karyawannya baik dan berkualitas, maka kinerja pemerintah daerah akan menjadi baik dan berkualitas juga (Mohamad Mahsun, 2012:25). Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal.

Kinerja memang telah menjadi sorotan penting dalam seluruh tahapan penyelenggaraan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kinerja pemerintah saat ini sering dinilai tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas. Dalam hal evaluasi kinerja saja hingga saat ini belum tersedia payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman penyusunan dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu minimnya jumlah dan kualitas pengelolaan kebijakan pemerintah daerah menjadi salah satu penyebab kurang berkualitasnya produk kebijakan yang dihasilkan. Sehingga peningkatan pelayanan

dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai salah satu visi/misi dan tujuan pemerintah daerah akan sulit tercapai (Ira Halidayati, 2014). Keberhasilan kinerja pemerintahan dapat dinilai dari pembangunan baik di bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Masyarakat luas menilai keberhasilan pembangunan pada bidang ekonomi yang terwujud dalam pembangunan infrastruktur. Pembangunan bukan hanya berarti penekanan pada akselerasi dan keberhasilan di bidang ekonomi, namun meliputi reorganisasi, pembaharuan seluruh sistem, aktivitas ekonomi dan sosial dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang menjalankan roda pemerintah yang sumber pengesahannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. Untuk pemerintah daerah, penilaian kinerja menjadi sorotan banyak pihak terlebih dengan adanya otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tuntutan agar instansi pemerintah terutama bagi pemerintah daerah untuk dapat mengukur kinerja semakin besar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah, yang diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Suatu pengukuran kinerja manajerial yang sah dan dapat dipercaya mutlak diperlukan untuk menilai prestasi manajer dan unit

organisasi yang dipimpinnya. Maka pengukuran kinerja manajerial instansi pemerintah patut mendapatkan perhatian yang serius sebab berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah. Agar pemerintahan yang baik tersebut menjadi kenyataan dan sukses, maka kualitas pelaksanaan kerjanya harus ditingkatkan.

Masalah yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu dilihat dari pelayanan yang lamban maupun penyelesaian pembangunan yang tidak tepat waktu. Sehingga penilaian dari masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintahan dinilai sangat rendah. Ini dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas sehingga masyarakat menuntut agar kinerja pemerintahan yang lebih baik. Tuntutan akan kinerja pemerintah yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan diterapkannya otonomi daerah dan penetapan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan pemerintah termasuk di pemerintahan Kab. Subang.

Fenomena terkait kinerja pemerintah daerah Kab. Subang yang penulis kutip dari Radio Republik Indonesia yaitu pemerintah Kab. Subang mendapatkan nilai CC dari KEMENPAN. Kab. Subang mendapat penilaian CC, untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Revolusi Birokrasi (Kemenpan RB). Hasil laporan tersebut menggambarkan kinerja yang dicapai oleh pemerintah Kab. Subang atas pelaksanaan program dan kegiatan, Terkait capaian tersebut, Plt Bupati Hajjah

Imas Aryumningsih mengatakan, akan meningkatkan kualitas laporan yang disusun menjadi jauh lebih baik lagi untuk tahun berikutnya.

(http://rri.co.id/post/berita/353609/daerah/subang_raih_cc_oleh_kemenpan_rb_atas_a_kuntabilitas_kinerja_intansi.html)

Dari fenomena tersebut berkaitan dengan dimensi yang dikemukakan oleh Mohammad Mahsun yaitu tidak sesuai dengan dimensi hasil (*outcome*) berisi tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, produktivitas para karyawan atau pegawai.

Fenomena lain terkait kinerja pemerintah yang penulis kutip dari kota subang.com yaitu Dusiaanya yang sudah menginjak 69 tahun, Subang telah mengalami perkembangan di berbagai bidang. Namun masih banyak pula berbagai kekurangan dari Pemerintah Kabupaten Subang yang dirasakan belum memuaskan masyarakat Subang. Ironisnya Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga jauh lebih rendah dari rata-rata IPM di Jabar, yang berada di angka 70,69. Sementara IPM Kab. Subang pada 2017 ialah 67,73. Pembangunan infrastruktur juga dapat dikatakan jauh dari harapan yang diinginkan, dari data Dinas PUPR dari 1.054,50 km total panjang jalan, kondisi jalan yang rusak sekitar 38,9% atau sekitar 400 km masih rusak, didapatkan hasil bahwa masyarakat Subang dalam segi kinerja pemerintah, pembangunan infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan masih dibawah harapan yang masyarakat inginkan. Di samping itu juga masyarakat di Kab. Subang juga masih relatif kesulitan mendapatkan pekerjaan. Akibatnya, angka pengangguran terbuka di daerah tersebut juga masih cukup tinggi.

<https://www.kotasubang.com/10265/kinerja-pemkab-subang>

Dari fenomena tersebut berkaitan dengan dimensi yang dikemukakan oleh Mohamad Mahsun yaitu tidak sesuai dengan dimensi manfaat (*benefit*) berisi tingkat kepuasan masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat. Dan dimensi dampak (*impact*) berisi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat.

Fenomena diatas memperlihatkan bahwa kinerja Kab. Subang belum maksimal sehingga tujuan utama dari pemerintah Kab. Subang belum tercapai salah satu contohnya yaitu pelayanan kepada masyarakat yang masih kurang, kesejahteraan masyarakat yang masih jauh dari harapan dan ketidakmampuan dalam menyusun indikator kinerja yang berpengaruh pada penilaian dari Kemenpan-RB yang mendapatkan nilai CC untuk pemerintah Kab. Subang.

Dalam upaya meningkatkan kinerja menurut Mardiasmo (2009:81) menerangkan bahwa kinerja pemerintah daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Sistem akuntansi sangat penting dalam kinerja instansi karena merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang *accountable*, dalam rangka mengelola dana dengan sistem secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diperlukan suatu pemikiran yang cerdas melalui inovasi sistem akuntansi, dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik (Abdul Halim, 2012:40).

Banyak yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dari sistem akuntansi keuangan daerah. Semakin bagus sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan

semakin meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. (Nurul Fathia, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.

Sedangkan menurut Halim dan Syam (2012:43) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Selain sistem akuntansi keuangan daerah, kesesuaian tugas juga merupakan faktor yang mempengaruhi dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Kesesuaian tugas berhubungan dengan sejauh mana kemampuan individual teknologi informasi dan menjalankan tugas untuk meningkatkan kinerja individual (Rahmawati, 2008 dalam Astuti dan Dharmadiaksa, 2014)

Banyak yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah dari kesesuaian tugas. Semakin bagus kesesuaian tugas, maka akan semakin meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. (Himawan, 2016 dan Khoirul, 2014)

Kesesuaian tugas dibentuk dari suatu kumpulan ketergantungan-ketergantungan tugas yang konsisten secara internal dengan elemen-elemen teknologi digunakan yang akan berakibat pada kinerja pelaksana tugas (Jogiyanto, 2008:494). Sedangkan menurut Zigurs et al. (1998) dalam Jogiyanto (2008:495), kesesuaian tugas adalah kebutuhan-kebutuhan perilaku untuk menyelesaikan suatu tujuan-tujuan yang sudah ditentukan, lewat beberapa proses, menggunakan informasi yang digunakan

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yasin (2017) dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kesesuaian Tugas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh dan penelitian Nurul Fathia (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus SKPD di Provinsi Riau).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kesesuaian Tugas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada SKPD di Pemerintah Daerah Kab. Subang).”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka pemasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kab. Subang.
2. Bagaimana kesesuaian tugas di Pemerintah Daerah Kab. Subang.

3. Bagaimana kinerja Pemerintah Daerah di Kab. Subang.
4. Seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kesesuaian tugas terhadap kinerja Pemerintah Daerah secara parsial.
5. Seberapa besar pengaruh pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kesesuaian tugas terhadap kinerja Pemerintah Daerah secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan rumusan masalah penelitian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan daerah dan kesesuaian tugas terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kab. Subang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian tugas di Pemerintah Daerah Kab. Subang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Daerah di Kab. Subang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar sistem akuntansi keuangan daerah dan kesesuaian tugas terhadap kinerja Pemerintah Daerah secara parsial.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan kesesuaian tugas terhadap kinerja Pemerintah Daerah secara simultan.

1.4 **Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain sebagai berikut:

1.4.1 **Kegunaan teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan dibidang akuntansi khususnya pada materi Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

1.4.2 **Kegunaan praktis**

a. Bagi penulis

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sistem akuntansi keuangan daerah baik secara teoritis maupun secara praktis. Selain itu dapat menambah wawasan dan pengalaman serta menjadi sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah dan membandingkannya dengan keadaan di lapangan.

b. Bagi pemerintah daerah

Bagi pemerintah daerah penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam bidang akuntansi sektor publik berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan kesesuaian tugas dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

c. Bagi pihak lain

Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian.

1.5 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di pemerintah Kab. Subang Jl. Dewi Sartika No. 2 (0260) 411005 Subang 41215 Jawa Barat – Indonesia. Waktu penelitian dimulai pada bulan Agustus sampai dengan selesai.